

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok Kebutuhan barang pokok dan penting di Kutai Barat cenderung stabil dan stok kebutuhan pokok tercukupi. Namun sejak awal Bulan Juni terjadi kenaikan harga beras medium serta bawang merah yang cukup signifikan.

Pada minggu ketiga dan keempat, harga beras medium Kabupaten Kutai Barat menduduki posisi no 2 tertinggi setelah Kabupaten Mahulu yaitu sebesar Rp. 18.035/Kg untuk Zona 2 ( Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, NTT dan Kalimantan ). Data tersebut diperoleh dari data olahan SP2KP Kemendag tanggal 26 Juni 2025. Sedangkan HET beras medium berada di harga Rp. 13.100/Kg dan beras premium di harga Rp. 15.400/Kg

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan harga beras medium dan premium selama bulan Juni

Selama bulan Juni terjadi kenaikan harga beras medium di Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Barat menduduki posisi no 2 tertinggi setelah Kabupaten Mahulu yaitu sebesar Rp. 18.035/Kg untuk Zona 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Barat melakukan pengecekan langsung di lapangan dan memperoleh informasi bahwa hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain : Kondisi jalan Nasional yang menghubungkan Kutai Barat dan Samarinda sebagai ibukota Provinsi mengalami kerusakan yang cukup parah di beberapa titik, sehingga menyebabkan distribusi tidak lancar dan meningkatkan biaya operasional, adanya Event Pekan Daerah Petani dan Nelayan se Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 21 - 27 Juni 2025 yang menyebabkan banyaknya orang yang datang ke Kabupaten Kutai Barat untuk mengikuti Event tersebut yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, serta beberapa faktor lain seperti panen yang kurang maksimal dari Petani Kutai Barat.

2. Komoditas Pangan sebagai Faktor Dominan Penyebab Inflasi/kenaikan harga

Harga bawang merah juga mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir, hal tersebut berimbas kepada pengusaha warung/catering. Kenaikan harga bawang merah ini juga diikuti dengan kenaikan harga bawang putih.

3. Ketergantungan Tinggi terhadap Pasokan dari Luar Daerah

Sebagai daerah yang bukan merupakan sentra produksi, Kabupaten Kutai Barat sangat bergantung kepada pasokan dari luar daerah seperti Samarinda, untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, bawang merah, bawang putih, cabe dan daging ayam ras. Beberapa komoditi tersebut masih disuplai atau dipasok dari daerah lain, terutama Samarinda, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan

4. Distribusi barang mengalami kendala karena akses jalan

Akses jalan yang masih rusak dan parah di beberapa titik di Kecamatan damai, Kecamatan Bongan dan Perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, sangat mempengaruhi kelancaran distribusi, terjadinya kerusakan pada banyak titik menyebabkan pergerakan harga menjadi naik karena biaya angkut yang lebih besar. Kerusakan disebabkan banyaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit dan CPO yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan jalan ini sudah seringkali dilaporkan ke Pihak Provinsi maupun Pusat. Pemerintah Kabupaten tidak bisa menganggarkan perbaikan karena status jalan Negara.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan penguatan koordinasi TPID se-Kaltim melalui kegiatan *Capacity Building* dan rapat koordinasi penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Provinsi
2. Kegiatan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada tanggal 23 Mei 2025 dalam rangka Kaltim Halal Festival Tahun 2025 dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Bulog Samarinda serta beberapa pedagang lokal.
3. Kegiatan Pemantauan harga dan stok Bahan pokok serta bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai dengan 5 Juni 2025 dengan menggunakan Dana APBD
4. Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Barat serta Zoom Meeting Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan setiap hari senin.
5. Pengawasan LPG 3 kg dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025
6. Pengawasan distribusi solar bersubsidi dilaksanakan di 16 Kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdapat APMS/SPBU dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2025

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **A. Keterjangkauan Harga**

1. Percepatan Pembuatan toko penyeimbang (Kios SIGAP), termasuk penggunaan dana BTT untuk upaya pengendalian inflasi
2. Maksimalkan Operasi Pasar dan/atau Gerakan Pangan Murah untuk komoditas pangan strategis yang memiliki potensi peningkatan tekanan harga
3. Sidak Pasar dan Distributor khususnya komoditas pangan strategis
4. Mendorong penambahan frekuensi penerbangan atau penambahan rute Sendawar-Samarinda

#### **B. Ketersediaan Pasokan**

1. Berdayakan BUMD sebagai penyangga pangan melalui perluasan Kerjasama Antar

- Daerah (KAD) dengan daerah sentra produksi
2. Penyaluran bantuan alsintan dilaksanakan oleh OPD teknis
  3. Menggalakkan program tanam di pekarangan masyarakat
  4. Penyediaan/pemanfaatan *cold storage* untuk produk hortikultura
  5. Meningkatkan pengadaan cadangan pangan pemerintah

### **C. Kelancaran Distribusi**

1. Subsidi ongkos angkut untuk penyediaan bahan pokok penting sangat diperlukan masyarakat untuk meminimalisir harga
2. Penguatan dan pemantauan kuota BBM di SPBU, khususnya solar untuk angkutan umum

### **D. Komunikasi yang Efektif**

1. Himbauan belanja bijak dan tidak *panic buying* kepada masyarakat
  2. Diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan masing-masing OPD melalui *high level meeting* untuk menyusun strategi pengendalian inflasi daerah.
2. Penguatan kelembagaan TPID dengan melaksanakan *Capacity Building*/studi tiru ke Daerah Produsen/ champion
3. Memanfaatkan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi, termasuk mendorong pembentukan kios penyeimbang di kabupaten Kutai Barat
4. Fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas dan pembangunan sarana pangan untuk komoditas pokok dan penyumbang inflasi tinggi.
5. Meningkatkan seruan konsumsi secara wajar dengan bijak berbelanja, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui publikasi informasi yang benar mengenai harga dan ketersediaan pangan